

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah : 1) Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis di Indonesia. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kebijakan hukum pidana pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis di Indonesia. Yang mana selanjutnya perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah urgensi pengaturan sanksi pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis? 2) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan : Penelitian hukum Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil Penelitian ini terkait dengan pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya ada satu pasal terkait residivis yaitu pasal 7 ayat (2) huruf b dan penjelasan pasalnya yang menyatakan diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun yang tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi. Anak residivis kehilangan haknya untuk diversifikasi, namun tidak diatur bagaimanakah penjatihan sanksi pidana ataupun tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis maupun Anak berstatus residivis yang lebih dari satu kali atau berulang kali melakukan tindak pidana, tidak dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut apakah residivis anak merupakan suatu pemberatan pidana ataukah bukan. Rekomendasi terkait penelitian ini adalah perlunya pengaturan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di masa yang akan datang terkait pengaturan sanksi pidana atau bentuk pemidanaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis yang baru pertama kali dengan Anak residivis yang lebih dari satu kali atau berulang kali dan pengaturan secara tegas dan jelas dengan lebih menekankan pada pembimbingan dan pembinaan dan bersifat edukatif untuk kepentingan terbaik bagi anak dan perlunya pembaharuan hukum dan kebijakan hukum pidana terkait penambahan ketentuan pasal dan penegasan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun peraturan pelaksanaannya, terkait bentuk pemidanaan anak berstatus residivis yang pertama kali dengan residivis yang lebih dari satu kali, merupakan suatu pemberatan pidana yang bersifat khusus dan perlu diatur tersendiri dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbeda dengan konsep pemberatan pidana dalam KUHP, sehingga terdapat kesepahaman diantara aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Residivis Anak.

CRIMINAL SANCTION ARRANGEMENTS FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW WITH RECIDIVIST STATUS IN INDONESIA

ABSTRACT

The objectives of this study were: 1) To review and analyze the regulation of criminal sanctions against children in conflict with the law with recidivist status in Indonesia. 2) To know and analyze the criminal law policy on the regulation of criminal sanctions against children in conflict with the law who have the status of recidivists in Indonesia. Which then formulates the problems in this study are 1) How is the urgency of regulating criminal sanctions against children in conflict with the law who have recidivist status? 2) How is the criminal law policy towards children in conflict with the law who have recidivist status in Indonesia? The research method used: Normative juridical legal research. The approaches used are statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of this study are related to the regulation of criminal sanctions against children in conflict with the law with recidivist status in Law Number 11/2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, there is only one article related to recidivism, namely Article 7 paragraph (2) letter b and the explanation of the article which states that diversion is carried out in the event that the criminal act committed is not a repetition of the criminal act. Repetition of criminal offense in this provision is a criminal offense committed by a child, both similar and non-similar criminal offenses, including criminal offenses resolved through Diversion. Recidivist children lose their right to diversion, but it is not regulated how the imposition of criminal sanctions or actions that can be imposed on children in conflict with the law with recidivist status or children with recidivist status who more than once or repeatedly commit criminal acts, it is not explained in the Law whether child recidivism is a criminal aggravation or not. Recommendations related to this research are the need to regulate criminal sanctions for children in conflict with the law with recidivist status in Law No. 11/2012 on the Criminal Justice System. Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System in the future related to the regulation of criminal sanctions or forms of punishment for children in conflict with the law with recidivist status for the first time with recidivist children who are more than once or repeatedly and strict and clear arrangements with more emphasis on guidance and guidance and educational in nature for the best interests of the child and the need for legal reform and criminal law policies related to the addition of article provisions and affirmation in the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System and its implementing regulations, related to the form of punishment of children with the status of first-time recidivist with more than one recidivist, is a special criminal aggravation and needs to be regulated separately in the Law on Juvenile Criminal Justice System which is different from the concept of criminal aggravation in the Criminal Code, so that there is an understanding among law enforcement officials.

Keywords: *Criminal Sanctions, Children in Conflict with the Law, Child Recidivis*